

**PROGRAM *THREE ENDS* UNTUK MENGAKHIRI KESENJANGAN
EKONOMI BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

EVI LIANI

1631700037



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Liani
NIM/Prodi : 1631700037/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : *Program Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan
Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Selatan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2020
Saya yang menyatakan,



Evi Liani
NIM: 1631700037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zaini Abidin Fatah, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 34 Telp: (0711) 362427 KM. 5,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Evi Liani

NIM/Prodi : 1631700037/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi
Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Selatan)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 4 Oktober 2020
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Marsaid, M.A.
NIM: 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos- 54 Telp: (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : **Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)**

Ditulis Oleh : Evi Liani

NIM : 1631700037

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 22 September 2020

Pembimbing Utama,

Dr. Rr. Riza Antasari, M.Hum
NIP: 196307121989032004

Pembimbing Kedua,

Luliana, M.E.Sy
NIDN: 2001019002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainul Abidin Falek, Kode Pos 30132 Kotak Pos 34 Telp (0711) 36247 KM. 3,3 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Evi Liani
NIM/Program Studi : 1631700037/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 08 September 2020

PANTIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal

Pembimbing utama : Dr. Rr. Rima Antasari, M.Hum

LI

Tanggal

Pembimbing Kedua : Lusiana, M.E.Sy

LI

Tanggal

Penguji Utama : Dr. Hj. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum

LI

Tanggal

Penguji Utama : Erniwati, S.Ag., M.Hum.

LI

Tanggal

Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum.

LI

Tanggal

Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag., M.Hum

LI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Karang Puc. 54 Telp (0711) 562427 EM. 3.5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kami menyatakan bahwa mahasiswi:

Nama Mahasiswi : Evi Liani
NIM/Program Studi : 1631700037/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan
Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari
penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsi agar dapat
mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 21 September 2020

Penguji Utama,

Dr. Hj. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum
NIP: 19651001 199903 2 001

Penguji Kedua,

Erniwati, S.Ag., M.Hum.
NIP:19720810 199903 2 004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA.
NIP: 19751024 200112 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan). Latar belakang penelitian ini yaitu perempuan seringkali dianggap memiliki banyak keterbatasan dalam keikutsertaannya pada kegiatan ekonomi. Kewajiban perempuan dianggap hanya berada pada kegiatan sosial dalam berkeluarga. Hal itulah menunjukkan adanya kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi. Kenyataannya perempuan memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya untuk menambah pendapatan penghasilan keluarga yang bilamana perempuan tersebut menjadi penganggungjawab ekonomi bagi keluarganya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan? *Kedua*, Bagaimana program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan membantu perempuan untuk memiliki usaha dalam kegiatan industri rumahan dan Desa PRIMA berupa bantuan barang atau perlengkapan usaha dan pelatihan usaha. Program ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan sangat sesuai untuk kemaslahatan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Kata Kunci: Perempuan, Kesenjangan, dan Ekonomi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	š	zet (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	`el
م	Mîm	M	Vii
ن	Nûn	N	Nûn

و	Wâwû	W	Wâwû
هـ	Hâ'	H	hâ'
ء	Hamzah	'	Hamzah
ي	Yâ'	Y	yâ'

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3	اُ	U	<i>Dammah</i>

b. Vokal Rangkap (Diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ai	a dengan i
2	اُو	Au	a dengan u

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal Panjang (Madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
----	------------	-------------	------------

1	ا	Â	a dengan topi di atas
2	ي	Î	i dengan topi di atas
3	و	Û	u dengan topi di atas

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

C. *Ta marbûtah*

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:

- huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi *mahkamah*.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المنورة المدينة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: الأطفال روضة menjadi *raudat al-afâl*.

D. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَلَ : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbanâ*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna* التَّوْع : *an-nau'*

أكل : *akala* إِنَّ : *inna*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain

(bukan Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(QS. An-Nahl 16: Ayat 97)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram."

(QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 28)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"

Persembahan

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

- Agamaku
- Ayahanda (Toybi) & Ibunda (Elia Herawati) tercinta
- Saudaraku (Irwan, S.Si) & saudariku (Sylviani)
- Sahabat dan orang terdekatku
- Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabibil'alaamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw atas tuntunan dan risalahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Skripsi yang berjudul “Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum Ekonomi Syariah di Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, penulis memiliki keterbatasan dan sepenuh hati menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik materiil maupun moriil dari semua pihak, maka skripsi ini tidak mudah terselesaikan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapat bimbingan, petunjuk dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, atas izin Allah SWT yang telah mengabulkan do'a hambanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana.
2. **Nabi Muhammad SAW** sebagai panutan dan suri tauladan umat Islam yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benedrang seperti sekarang ini.
3. Kedua orang tuaku tercinta **Ayahanda Toybi** dan **Ibunda Elia Herawati**, saudaraku **Irwan, S.Si** dan saudariku **Sylviani** yang selalu memberikan doa,

kasih sayang, dukungan baik moril dan materil serta semangat motivasinya yang membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.

4. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. **Bapak Dr. H. Marsaid, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. **Ibu Dra. Atika, M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. **Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I.**, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. **Bapak Drs. Asili, M.Pd.I.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat selama masa perkuliahan.
9. **Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum.** dan **Ibu Lusiana, S.H.I., M.E.Sy.**, selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbingII yang telah banyak memberikan masukan, membimbing, meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan saran dengan sabar dan ikhlas selama penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.
10. **Ibu Dr, Hj. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum.** dan **Ibu Erniwati, M.Ag.**, selaku dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah memberikan koreksi, saran, dan masukan serta bimbingannya.
11. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta karyawan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
12. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Ayeza Riska Febriyani, Nurdiana, Arlisa dan Annisa Ulfa Ningtyas (Harmony). Teman-teman seperjuanganku, Hukum

Ekonomi Syariah angkatan 2016, terkhusus HES 1 2016 terima kasih atas kebersamaan selama ini.

14. Semua teman-teman, kakak-kakak, mba-mba, dan adik-adik Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) terkhusus GEMES 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman dan cerita menarik semasa perkuliahan, serta kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Sahabat-sahabat KKN Kelompok 55 Angkatan 71 UIN Raden Fatah Palembang di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kita semua. Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, September 2020

Penulis

Evi Liani

1631700037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Program <i>Three Ends</i>	
1. Pengertian	15
2. Dasar Hukum	17
3. Tujuan	20
4. Program <i>Three Ends</i> di Provinsi Sumatera Selatan	21
B. Akhiri Kesenjangan Ekonomi Untuk Perempuan Dalam Program <i>Three Ends</i>	
1. Pengertian	23
2. Kesenjangan Ekonomi Terhadap Perempuan	26
3. Gender dan Feminisme Dalam Ekonomi	28
C. Perempuan	
1. Kedudukan Perempuan Dalam Islam	31
2. Kedudukan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi	34

D. Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian	38
2. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia	39
3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	41
4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah	47
B. Letak dan Wilayah	47
C. Visi dan Misi.....	48
D. Tugas Pokok dan Fungsi	50
E. Susunan dan Struktur Organisasi	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Program <i>three ends</i> untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	66
B. Program <i>three ends</i> untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2019, 3.
- Tabel 1.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017-2018, 8.
- Tabel 1.3 Responden dan Informan Penelitian, 16.
- Tabel 4.4 Data Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk Kelompok Industri Rumahan Tahun 2018, 86.
- Tabel 4.5 Data Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk Desa PRIMA Tahun 2017, 87.
- Tabel 4.6 Data Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk Desa PRIMA Tahun 2018, 89.
- Tabel 4.7 Data Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk Desa PRIMA Tahun 2019, 89..

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IR	: Industri Rumahan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PRIMA	: Perempuan Indonesia Maju Mandiri
PUSPA	: Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
RI	: Republik Indonesia
RPJMD	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program *Three Ends* dalam penelitian ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia dan diimplementasikan di seluruh Provinsi wilayah Indonesia. Program yang dideklarasikan pada tahun 2016 memiliki komitmen strategis yang terdiri dari tiga hal yaitu 1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*), 2) Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*), dan 3) Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*)¹.

Komitmen dalam 3 Program yang dijadikan dasar pelaksanaan hasil penelitian dan dinamika yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU 2019) dalam ranah Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*) terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466), serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pada tahun 2019 kasus paling tinggi di ranah privat² tercatat 71% atau 9.637 kasus, ranah publik/komunitas³ (28%) 3.915 kasus, dan ranah negara⁴ 16 kasus (0,1%).

¹ “Program Prioritas/Keunggulan KPPPA 2016” oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada Rabu 01 Juni 2016, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

² Ranah personal/ privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban

³ Ranah publik/ komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

⁴ Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Sementara data Pengadilan Agama sejumlah 392.610 adalah penyebab perceraian yang diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri⁵.

Program Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*) karena penilaian hasil data yaitu dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus⁶. Sementara Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*) dinilai dari keberadaan kaum perempuan di wilayah ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 sampai 2019, sekitar 60% Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Indonesia digerakkan oleh perempuan, dan terbukti mampu bertahan dari krisis moneter yang menimpa Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, usaha mikro dan kecil menyumbangkan sekitar 56,5% dari Produk Domestik Bruto, dan menyerap sekitar 66,7% tenaga kerja di sektor usaha mikro, dan kecil, di mana sekitar 70% pelakunya adalah perempuan.

Menurut Laporan *International Finance Corporation* (IFC) tahun 2011 “*Strengthening Access to Finance for Women-Owned SMEs in Developing Countries* (Meningkatkan Akses Finansial bagi UKM milik Wanita di Negara-Negara Berkembang)” menunjukkan bahwa rasio formal lapangan kerja wanita berkorelasi dengan proporsi UKM milik wanita diantara jumlah UKM. Pada tahun 2009, Survei tentang Perusahaan oleh Bank Dunia menemukan bahwa 42,8 % UKM formal dimiliki oleh perempuan. Pada saat yang sama, lapangan kerja formal perempuan adalah 46,7 %. Dengan rasio lapangan kerja formal di Indonesia adalah milik perempuan⁷. Selain itu, persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin pada tahun 2016-2019 sebagai berikut.

⁵ *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁶ Maidian Reviani, “*Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia*”, www.akurat.co pada tanggal 29 Juli 2019, diakses tanggal 10 September 2019.

⁷ *International Finance Corporation (IFC) WORLD BANK GROUP* (Maret 2016), 7.

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen)			
	2019	2018	2017	2016
Laki - Laki	47.39	46.29	45.66	45.05
Perempuan	39.31	38.20	38.63	38.16

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kurang dari 40% perempuan yang bekerja di sektor formal. Hal itulah yang pada akhirnya membuat perempuan bekerja di sektor informal dan berusaha memiliki UKM untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut menjadi prioritas oleh KPPPA dalam mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian dengan melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak. Terkait perlindungan hak perempuan dan anak KPPPA telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT. Sedangkan yang terkait dengan perdagangan manusia terdapat UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam hal kesenjangan ekonomi, pemerintah masih dalam proses mengatasi permasalahan ini dengan berbagai cara yakni memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan kredit mikro. Namun tidak hanya pembangunan rakyat, pemerintahan saat ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah⁸.

Kesenjangan ekonomi seringkali dialami oleh perempuan dimana merekalah yang paling menderita kemiskinan, kekurangan gizi, dan paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan bentuk jasa sosial lainnya. Jika membandingkan standar hidup layak antara penduduk

⁸ Yenny Joe, "Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia", kompas.com pada tanggal 31 Agustus 2018, diakses tanggal 10 September 2019.

miskin di negara berkembang, akan terungkap bahwa yang paling menderita adalah anak-anak. Akses kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berbagai tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang dilancarkan oleh pemerintah sangat terbatas. Selain itu masalah diferensiasi upah karena perbedaan gender dievaluasi sebagai salah satu yang paling penting dalam perekonomian negara dan kehidupan sosial.

Ketidaksetaraan gender yang dialami kaum perempuan membatasi pilihan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menikmati pembangunan. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak terkecuali perempuan. Era globalisasi dan demokrasi saat ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Setiap individu berhak berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan.

United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan dalam *Human Development Report (HRD)* bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antar generasi, etnis, jenis kelamin, maupun antar wilayah, dimana salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender⁹. Indeks pertumbuhan yang berkaitan dengan gender adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi menangkap ketidaksetaraan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki yaitu 67.61% IPM Perempuan sementara IPM Laki laki 73%¹⁰. Dari data tersebut menunjukkan bahwa IPM pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga dapat diketahui bahwa tidak setaranya pertumbuhan pada pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dimana perempuan dalam pemikiran masyarakat yang masih bersifat tradisional (*etnosentrisme*) beranggapan bahwa perempuan hanya harus berada pada urusan rumah

⁹ Dara Veri Widayanti, dkk, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Keenjangan Upah Gender”, Bandung: Proceeding PESAT, Volume 5 Oktober 2013, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

¹⁰ Sumber Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

tangga dan hal inilah yang harus diubah dalam masyarakat bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, hal itu adalah kunci tercapainya pembangunan ekonomi.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Sumbangan Pendapatan Perempuan di Indonesia mencapai 36.70% pada tahun 2018 sedangkan untuk daerah Sumatera Selatan Sumbangan Pendapatan Perempuan pada tahun 2018 yaitu 34.71%¹¹. Artinya perempuan ikut dalam membantu pendapatan perekonomian negara oleh karena itu perempuan dapat setara dengan laki-laki dalam hal memperoleh pekerjaan dan mendapatkan hasil dari pekerjaannya sesuai kemampuannya.

Dalam kajian hukum Islam, perempuan tidak dilarang untuk bekerja. Perempuan boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah Swt mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya¹²:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ١٠٥

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu....."

Perintah ini mencakup laki-laki dan perempuan. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, Karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bisnisnya perempuan, hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dan kemungkaran.

Pentingnya pemberdayaan perempuan untuk menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari perempuan sebagai kelompok masyarakat, yang berdasar pada sumber daya pribadi yang langsung melalui

¹¹ Sumber Data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Tahun 2018, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

¹² Q.S. At-Taubah Surah ke-9 Ayat 105.

partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial. Pemberdayaan merupakan proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta usaha mereka sendiri serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Kehadiran perempuan sebagai salah satu potensi pembangunan, disarankan sudah sangat mendesak, karena pada saat ini Indonesia sedang berada pada suatu momentum yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Partisipasi perempuan secara umum dikelompokkan dalam dua peran yaitu peran tradisi dan peran transisi. Peran tradisi mencakup peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, sedangkan peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, dan anggota masyarakat pembangunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Sumatera Selatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten/kota sebagai berikut.

TABEL 1.1

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017-2018

Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2018	2017
OGAN KOMERING ULU	57.32	56.84
OGAN KOMERING ILIR	57.47	56.08
MUARA ENIM	61.55	60.18
LAHAT	62.77	60.87
MUSI RAWAS	49.76	55.54
MUSI BANYUASIN	73.01	72.18
BANYU ASIN	60.00	59.89
OGAN KOMERING ULU SELATAN	54.04	54.54
OGAN KOMERING ULU TIMUR	56.99	57.34
OGAN ILIR	49.62	51.24

EMPAT LAWANG	59.70	61.15
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	55.31	55.62
MUSI RAWAS UTARA	52.47	53.42
KOTA PALEMBANG	64.28	63.41
KOTA PRABUMULIH	55.94	55.75
KOTA PAGAR ALAM	58.51	58.11
KOTA LUBUKLINGGAU	65.13	62.43

Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2017-2018

Dilihat dari tabel diatas Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di Sumatera Selatan yang paling besar jumlahnya yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dimana berjumlah 73.01% sedangkan Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi dibawahnya dengan jumlah 64.28% selisih 8.73%. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemberdayaan gender di kota Palembang khususnya dan kota lainnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian berjudul “**Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)** yang layak dikaji secara lebih mendalam.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Menjelaskan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.
- c. Mengetahui program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Pertama, Endah Novianti, “Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia” Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jenis kelamin, umur, status perkawinan, asal daerah tempat tinggal, jumlah tanggungan anak (0-14 tahun), pendapatan rumah tangga, dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perempuan untuk menganggur sehingga mempengaruhi kesenjangan gender tingkat pengangguran terbuka pada perempuan¹³.

¹³ Endah Novianti, “Kesenjangan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia” Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universtias Negeri Yogyakarta, 2018.

Kedua, Ulung Purba “Analisis Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Povinsi Lampung” Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam skripsi ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Rasio Angka Harapan Hidup (RAHH), Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS), dan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (RTPAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung¹⁴.

Ketiga, Fristy Havira “Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Lampung” Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, variabel angkatan kerja, dan variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi dan dalam perspektif ekonomi syariah bahwa PDRB merupakan gambaran kesejahteraan perekonomian masyarakat dan setiap manusia wajib memberikan rezeki yang diperoleh melalui zakat, shadaqah dan wakaf agar distribusi pendapatan lebih merata dan menurunkan ketimpangan¹⁵.

Keempat, Puspa Ratih Anggraeni “Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah” Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Dalam skripsi ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah meningkat pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah, tetapi setelah pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai efektif,

¹⁴ Ulung Purba, “Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung”, Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, 2016.

¹⁵ Fristy Havira, “Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kesenjangan Ekonomi Di Provinsi Lampung”, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin menurun walaupun masih dalam taraf tinggi¹⁶.

Andi Kasmawati dan Lu'mu Taris dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Program Three Ends Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga di Kota Makassar*", menemukan hasil penelitiannya bahwa program *three ends* dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu pertama, dilaksanakan langsung oleh KPPPA berupa sosialisasi dan pencangan program dan kedua, dilaksanakan oleh DPPPA Kota Makassar secara intergratif kedalam berbagai program DPPPA sesuai bidang masing-masing program. Faktor yang menghambat penerapan program *three ends* yaitu adanya hambatan dari luar (eksternal) dilapangan dan strategi yang digunakan yaitu menjadikan program *three ends* sebagai kegiatan dasar yang berkesinambungan¹⁷.

Frestiana Dyah Mulasari dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Gender Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*" dalam pembahasannya melakukan pendekatan ekonomi dan peran gender perempuan dalam pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah serta tidak membahas program *three ends* dan hukum ekonomi syariahnya¹⁸.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu¹⁹. Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris.

¹⁶ Puspa Ratih Anggraeni, "*Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah*" Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2012.

¹⁷ Andi Kasmawati, Lu'mu Taris "*Implementasi Program Three Ends Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga di Kota Makassar*" Jurnal Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, 2018.

¹⁸ Frestiana Dyah Mulasari "*Peran Gender Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*" Artikel Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015.

¹⁹ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 44.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian²⁰ yaitu kepada responden penelitian yang mengkaji tentang program *Three Ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. *Field research* ialah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat tersebut²¹.

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang program *Three Ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah²² yang berkaitan dengan program *Three Ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dengan pendekatan kajian hukum ekonomi syariah. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan

²⁰ Cholid Narbuko dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 21.

²¹ Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenali* (Palembang: Rafah Press, 2018), 44-45.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 39.

informasi yang dipilih²³. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara terhadap program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri dari buku-buku, melihat atau mendengarkan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan masalah.
- c. Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan tambahan dari data primer dan data sekunder untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan website²⁴.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Alasan pengambilan wilayah tersebut karena:

- a. Program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi oleh KPPPA merupakan program pembangunan nasional dengan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait yang dalam hal ini pemerintah daerah yang menjalankannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan dan menjalankan program tersebut.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki prospek yang baik dan maju untuk memberi peluang dan kesempatan bagi perempuan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi.

4. Responden

Responden penelitian ini adalah semua orang yang berhubungan dengan Program *Three Ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 62.

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 84.

Selatan. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memiliki hubungan dengan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Pengambilan responden dengan *purposive sampling* yaitu dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria responden dalam penelitian ini sebagaimana tertulis dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
RESPONDEN DAN INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jumlah
1	Titin Sumarni, M.Pd.	Kasi Pemberdayaan Ekonomi
2	Samsah, S.Sos	Kasi Pembinaan Kualitas Keluarga
3	Syahrudin, S.E.	Kasi Pemberayaan Sosial, Politik dan Hukum
4	Welly Muhammad Rahmadi, S.SI.	Staf Kasi Pembinaan Kualitas Keluarga

Sumber: Olah Data, 2020

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu (1) wawancara dan (2) dokumentasi²⁵. Keduanya dideskripsikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)²⁶. Teknik ini digunakan secara langsung untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah melalui pertanyaan kepada para responden yang sesuai dengan kriteria.

b. Dokumentasi

²⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan kajian penelitian seperti dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, data pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi, literatur yang otoritatif terhadap kajian pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil untuk perempuan, termasuk kajian-kajian dalam literatur hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan, digambarkan, disajikan dan dijelaskan semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik dan bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian dengan mudah dipahami.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan 5 bab yang dideskripsikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi program *three ends* meliputi pengertian dasar hukum, tujuan dan program *three ends* di provinsi Sumatera Selatan. Akhiri kesenjangan ekonomi dalam program *three ends* meliputi pengertian dan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Perempuan meliputi kedudukan perempuan dalam Islam dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi sejarah, lokasi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, susunan dan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang meliputi (1) pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan; dan (2) program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya.